

**MOVING TOWARDS THE COMMON GOAL OF COLLABORATIVE
GOVERNANCE IN INDONESIA AMID THE ENDEMIC COVID-19**



Oleh :

PUTRA ANUGERAH WIBOWO

NIM : 19221819

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2023

**MOVING TOWARDS THE COMMON GOAL OF COLLABORATIVE
GOVERNANCE IN INDONESIA AMID THE ENDEMIC COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar
Sarjana dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Artikel Ini Disusun Oleh : PUTRA ANUGERAH WIBOWO
NIM : 19221819
Dengan Judul : **Moving Towards The Common Goal of Collaborative
Governance in Indonesia Amid The Endemic Covid-19**
Disahkan Pada : 20 Juli 2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ponorogo, 20 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP
NIDN. 0703058104

Pembimbing II



Dra. Ekapti Wahjuni DJ., M.Si
NIDN. 0722126101

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : MOVING TOWARDS THE COMMON GOAL OF
COLLABORATIVE GOVERNANCE IN INDONESIA
AMID THE ENDEMIC COVID-19

Disusun Oleh : PUTRA ANUGERAH WIBOWO

Telah Dipertahankan : 20 Juli 2023
di depan penguji pada

Hari : Kamis

Ruang : B102

Pukul : 10.00 WIB

DEWAN PENGUJI

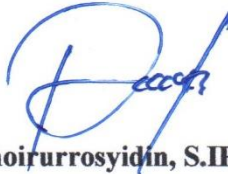
Penguji I



Dra. Ekapti Wahjuni DJ., M.Si

NIDN. 0722126101

Penguji II



Khoirurrosyidin, S.IP., M.Si

NIDN. 0705057501

Penguji III



Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP

NIDN. 0703058104

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



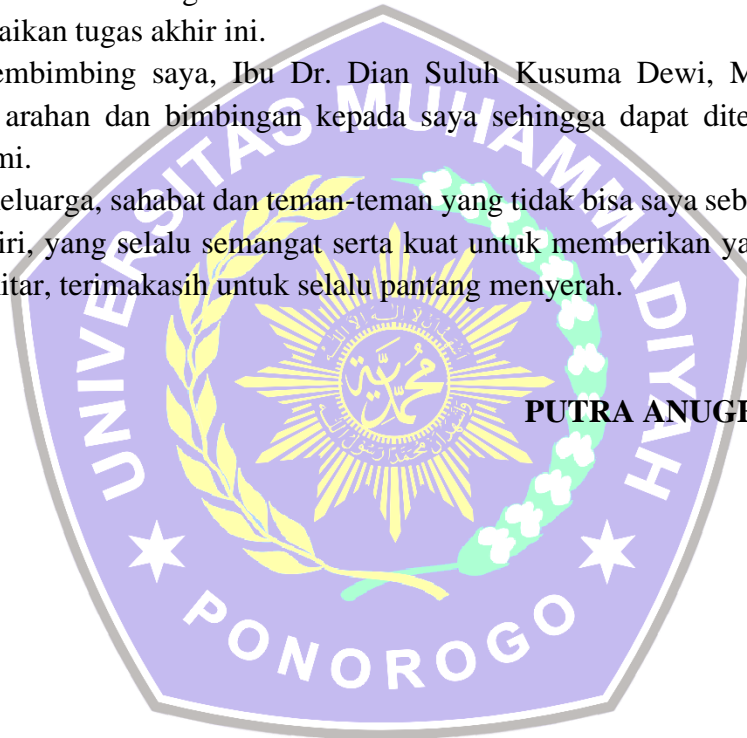
Agus Dwi Anggoro, Ph.D

NIK. 19860325 201309 12

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang hingga saat ini selalu memberikan saya kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, begitu banyak bantuan dan kejutan yang tidak terduga sehingga selalu ada alasan saya untuk selalu bersyukur.
2. Orang Tua saya, Mamah dan Bapak, yang telah mengantarkan saya dan selalu mendukung saya, serta do'anya yang tidak pernah putus hingga sampai di titik saya memperoleh gelar sarjana ini.
3. Saudara kandung saya Candra Hima Yudha Pratama dan saudara ipar perempuan saya Vivi Dyah Hapsorowati serta keponakan saya Arsyandra Nararya Putra Yudhatama yang selalu mendukung baik secara materil dan non materil kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP, yang selalu memberi arahan dan bimbingan kepada saya sehingga dapat diterbitkannya artikel jurnal kami.
5. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Diri sendiri, yang selalu semangat serta kuat untuk memberikan yang terbaik kepada orang sekitar, terimakasih untuk selalu pantang menyerah.



PUTRA ANUGERAH WIBOWO

MOTTO

“Seorang pendekar itu berarti tidak boleh pernah benci atau dendam.”

– Prabowo Subianto



ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memetakan topik dan isu kebijakan Pemerintah Indonesia dari pandemi menuju endemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari literatur seperti media online dan website resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan dan jurnal penelitian terkait kebijakan Pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19 lalu diolah menggunakan aplikasi Nvivo 20. Artikel yang direview sejumlah 251 artikel yang bersumber dari database Dimensions. Data yang diolah menggunakan pengkodean otomatis dan dianalisis menggunakan fitur word cloud analysis dan hierarchy chart. Hasil penelitian mengungkapkan kebijakan-kebijakan disaat pandemi Covid-19 mengalami pelonggaran. Pelonggaran kebijakan berdasarkan atas hasil kasus Covid-19 yang terus menurun dan situasi pandemi yang semakin terkendali. Pelonggaran kebijakan tersebut antara lain diperbolehkannya mudik kembali ditahun 2022, masyarakat boleh tidak menggunakan masker di ruang terbuka, Pelaku Perjalanan Domestik (PPDN) dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dengan vaksin lengkap tidak perlu menunjukkan tes antigen maupun PCR, dilaksanakannya kembali pembelajaran tatap muka, serta dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan-kebijakan yang dilonggarkan oleh pemerintah merupakan langkah masa transisi dari pandemi menuju endemi. Perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah memerlukan adaptasi kebijakan dan koordinasi pada antar pemerintah di tingkat pusat hingga daerah.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Collaborative Governance; Endemi Covid-19

ABSTRACT

This article aims to map the topics and issues of the Government of Indonesia's policies from the pandemic to the endemic of Covid-19. This study uses a qualitative approach. Data were obtained from literature such as online media and official government websites, laws and regulations and research journals related to Indonesian Government policies in the Covid-19 pandemic and then processed using the Nvivo 20 application. There were 251 articles reviewed and sourced from the Dimensions database. The data is processed using automatic coding and analyzed using the word cloud analysis and hierarchy chart features. The results of the study reveal that policies during the Covid-19 pandemic experienced easing. Policy easing is based on the declining results of Covid-19 cases and the increasingly controlled pandemic situation. The easing of this policy is that people are allowed homecoming, not wearing masks, domestic and foreign travellers with complete vaccines do not need to show antigen or PCR tests, face-to-face learning, and the lifting the Community Activity Restrictions (PPKM). The policies relaxed by the government are a transitional step from a pandemic to an endemic. Policy changes taken by the government require policy adaptation and coordination between governments at the central to regional levels.

Keywords: Public Policy; Government; Covid-19

KATA PENGANTAR

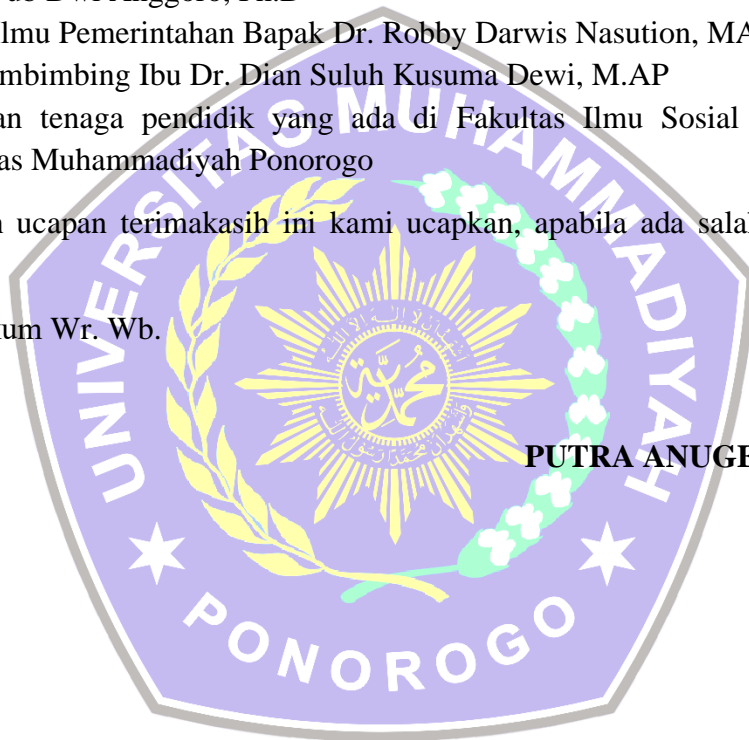
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang menciptakan bui dan isinya, sehingga melalui pertanda-pertandanya, manusia diberikan pengetahuan dimana proses tersebut dapat dilakukan melalui proses belajar mengajar, manusia kemudian diciptakan menjadi makhluk yang sempurna diantara ciptaan-Nya yang lain. Proses pembelajaran ini, kemudian menghasilkan salah satunya menghasilkan Tugas Akhir, berupa skripsi, dalam proses penyelesaian skripsi penulis merasa banyak terbantu oleh pihak-pihak yang mendukung tanpa lelah, baik secara materil maupun non materil, sehingga kiranya ucapan terima kasih bisa kami sematkan dalam skripsi ini, ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo Bapak Ayub Dwi Anggoro, Ph.D
2. Kaprodi Ilmu Pemerintahan Bapak Dr. Robby Darwis Nasution, MA
3. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP
4. Dosen dan tenaga pendidik yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Demikian ucapan terimakasih ini kami ucapkan, apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



PUTRA ANUGERAH WIBOWO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Putra Anugerah Wibowo

NIM : 19221819

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Artikel dengan judul “**Moving Towards The Common Goal of Collaborative Governance in Indonesia Amid The Endemic Covid-19**” adalah hasil karya saya dan artikel ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam artikel ini dapat dibuktikan terdapat unsur **PLAGIASI**, saya bersedia artikel ini **DIGUGURKAN** dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Artikel ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan



PUTRA ANUGERAH WIBOWO
NIM. 19221819



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Robby Darwis Nasution, M.A
NIK : 1986022820150913
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilakukan dan/atau diajukan oleh :

Nama : Putra Anugerah Wibowo
NIM : 19221819
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul : *Moving Towards The Common Goal Of Collaborative Governance In Indonesia Amid The Endemic Covid-19*

Adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan..

Demikian Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Robby Darwis Nasution, M.A

Ponorogo, 25 Juli 2023
Pembimbing

Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ix
LEMBAR PERSETUJUAN PENGGANTI TUGAS AKHIR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
Moving Towards The Common Goal Of Collaborative Governance In Indonesia Amid The Endemic Covid-19.....	1
ABSTRAK.....	1
PENDAHULUAN	2
METODE PENELITIAN.....	3
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	3
KESIMPULAN.....	7
DAFTAR PUSTAKA	7
LAMPIRAN.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia	2
Gambar 2. Isu Dominan Kebijakan Nasional Indonesia.....	4





Moving Towards The Common Goal of Collaborative Governance in Indonesia Amid The Endemic Covid-19

Putra Anugerah Wibowo* & Dian Suluh Kusuma Dewi

Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

Submitted: April 17, 2023; Reviewed: June 18, 2023; Accepted: June 25, 2023

Abstract

This article aims to map the topics and issues of the Government of Indonesia's policies from the pandemic to the endemic of Covid-19. This study uses a qualitative approach. Data were obtained from literature such as online media and official government websites, laws and regulations and research journals related to Indonesian Government policies in the Covid-19 pandemic and then processed using the Nvivo 20 application. There were 251 articles reviewed and sourced from the Dimensions database. The data is processed using automatic coding and analyzed using the word cloud analysis and hierarchy chart features. The results of the study reveal that policies during the Covid-19 pandemic experienced easing. Policy easing is based on the declining results of Covid-19 cases and the increasingly controlled pandemic situation. The easing of this policy is that people are allowed homecoming, not wearing masks, domestic and foreign travellers with complete vaccines do not need to show antigen or PCR tests, face-to-face learning, and the lifting the Community Activity Restrictions (PPKM). The policies relaxed by the government are a transitional step from a pandemic to an endemic. Policy changes taken by the government require policy adaptation and coordination between governments at the central to regional levels.

Keywords: Public Policy; Government; Covid-19

How to Cite: Wibowo, P.A., & Dewi, D.S.K. (2023). Moving Towards The Common Goal of Collaborative Governance in Indonesia Amid The Endemic Covid-19. PERSPEKTIF, 12 (3): 992-1001.

*Corresponding author:

E-mail: putraanugerah294@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)

ISSN 2684-9305 (Online)



INTRODUCTION

In 2019, the world was shocked by an outbreak of pneumonia or inflammation of the lungs. The disease outbreak is characterized by fever, dry cough, tiredness and symptoms of digestive infection. This outbreak was first discovered in Hubei Province, China. The World Health Organization (WHO) named the disease Coronavirus 2 (SARS CoV-2) Covid-19. The covid-19 disease is caused by the SARS-CoV-2 virus, which causes severe acute respiratory symptoms. As of March 11 2022, the Covid-19 disease has spread to 114 countries with more than 118,000 positive confirmed cases and 400 deaths. With the rapid spread, the WHO declared this disease a pandemic (Firdaus, 2022). While Covid-19 cases spiked in China from December 2019 to February 2020, Indonesia reported no cases of Covid-19 at all. However, in April 2020, Indonesia confirmed the entry of the Covid-19 virus with 1790 cases; 170 died, and 112 recovered.(Djalante et al., 2020). On September 15 2021, the Government of Indonesia confirmed the number of people confirmed positive for Covid-19 totalling 4,178,164 people (Annisa, 2021). The Government claims the first peak of Covid-19 on July 15 2021, with 56,757 cases (Sabiila, 2022). Several countries in the world have considered implementing a policy of living with Covid-19. The journey from the pandemic phase to the endemic phase depends on the level or parameters of vaccination levels, immunity, transmission, and the emergence of new variants (Hong et al., 2022).

The steps taken by the Government of Indonesia in dealing with Covid-19 are to tighten all activities carried out by the community and increase allocations to the health sector and social protection for people affected by Covid-19 (Putera et al., 2022). All examinations related to Covid-19, in terms of analysis, inpatient services, quarantine facilities and treatment, are entirely borne by the Government of Indonesia. For these funds, BPJS Health acts as a mediator and disburses funds from the Government to health facilities (Kesehatan et al., 2022). The Minister of Health of the Republic of Indonesia is working with the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, the Minister of Foreign Affairs and the Minister of BUMN to carry out several policies related to the Covid-19 vaccine and vaccination program. To achieve herd immunity against the Covid-19 Pandemic, the Government of Indonesia has set a vaccination program to be distributed to 208.27 million Indonesians (Martina, 2022). Vaccines will optimally produce virus-neutralizing antibodies to prevent Covid-19 disease and avoid unwanted effects. Several companies and research institutions have succeeded in developing a Covid-19 vaccine, which will be the hope for eradicating the Covid-19 virus. Indonesia is listed as the largest vaccine-implementing country that provides an average of 336 thousand doses per day or more than 18.5 million doses (Arifin & Anas, 2021).

People's mobility has improved with the revocation of the PPKM policy, eliminating antigen and PCR requirements, reducing the quarantine period, and the freedom to open masks in open spaces. Improved mobility can be seen in tourist attractions and public transportation facilities such as stations, terminals and wharves (Banowati & Dewi, 2022). The Indonesian Government is slowly starting to implement the transition from a pandemic to an endemic (EMedia DPR RI, 2022). During the transitional period, the Government of Indonesia made gradual and complete policy adjustments. The Government of Indonesia started by allowing the relaxation of community activities, and the Government agreed to use this time to restore the national economy, which had been hampered when the Pandemic came with the loosening of rules for travellers, both nationally and internationally. The Government will transition from Pandemic

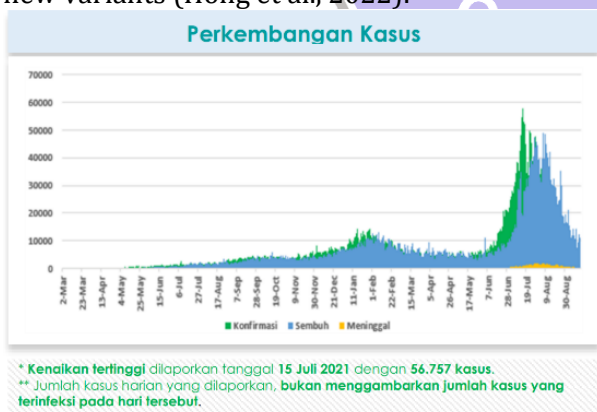


Figure 1. Development of the Covid-19 case in Indonesia
 Source: (Infeksi Emerging, 2021)

to endemic because it is felt that Covid-19 will not disappear soon (Citra Eka Putri & Hamzah, 2022). Of course, all policies towards endemic Covid-19 are not formulated alone; collaboration from all aspects is needed, namely experts, the media, community leaders, religious leaders, community organizations and the Government (Kemkes, 2022).

The Indonesian Government's policies towards the Covid-19 endemic are abolishing antigen and PCR requirements for domestic travel, revoking the quarantine policy for foreign travellers (PPLN) with negative results, reducing the maximum passenger limit on various public transportation facilities, and allowing spectators to attend sports matches (Sembiring, 2022). The PPKM policy was officially revoked on December 30 2022, after it was assessed that the pandemic situation was improving (Humas Kemensetneg, 2022). Problems in dealing with the Covid-19 Pandemic are problems to be faced together. Constitutionally, it is the duty and role of the Government to provide health protection services. All parties, be it the Government, non-governmental organizations, NGOs, and the community, must collaborate to deal with the Covid-19 Pandemic (Juaningsih et al., 2020). The term collaboration is usually referred to as "Collaborative Governance" or collaborative governance. Collaborative Governance instruments include public institutions, non-governmental or private actors, and communities. Collaborative governance includes various aspects of planning, policy-making and management governance processes (Ansell & Gash, 2008). The results of previous studies, according to (Kim et al., 2022), Singapore's success in handling Covid-19 is due to collaboration between government agencies and various private parties that help prevent the public health system from being overwhelmed and ensure that people get maximum and proper health services sustainably. The research is located in Singapore using a comparative case study approach, namely analyzing content related to government documents, articles and academic journals. The research focuses on how the experience of the SARS outbreak has informed the Government's collaborative efforts with other stakeholders in society. This research will discuss Indonesia's collaborative governance to move towards a common goal amid the Covid-

19 Endemic, where the author aims to analyze how the Indonesian Government is moving from a pandemic to a Covid-19 endemic. This research is essential to analyze policies issued by the Government of Indonesia and contribute to developing knowledge in the field of government science.

RESEARCH METHODS

This study uses a qualitative approach to analyze the policies of the Government of Indonesia from the Pandemic to the endemic Covid-19. This article uses a literature review to examine the policy as a data collection technique. Reviewing policies with various focuses requires in-depth and cross-focus studies so that the division into two groups that conflict with each other in policies can be minimized (Wardhana, 2020). The object of discussion takes national policies, so data is taken from literature such as online media and official government websites, laws and research journals related to Indonesian Government policies during the Covid-19 Pandemic. The data obtained is then processed using the Nvivo 20 application. The nvivo 20 application is software that can help process and understand qualitative data better and with certainty (Clarke et al., 2021).

RESULTS AND DISCUSSION

The data obtained for analysis in the discussion amounted to 251 articles which were then re-selected into 49 scientific articles related to government policies from the Pandemic to endemic Covid-19. All of this data is processed using the Nvivo 20 software. Nvivo is an application that can import and organize files quickly, be it text files, audio, visuals, emails, or social media posts. Nvivo allows for the independent assignment of codes or according to coding schemes established by researchers (Clarke et al., 2021). The results of the Word Frequency Query in the processed data set display the themes that appear most frequently in the article. These words will give meaning to an issue that is the main topic discussed in the 49 articles.



Figure 2. Indonesian National Policy Dominant Issues
Source: Nvivo 20

The frequency of the resulting words displays the words "covid", "government", "Indonesia", and "policy" which are the four highest words in discussing policy issues from Pandemic to endemic. This shows that all the articles processed have the same research focus. Several other words also focus on topics such as a vaccine, health, and implementation.

Dynamics of government policies in dealing with the Covid-19 Pandemic

Almost all countries in the world are experiencing health and humanitarian crises caused by the Covid-19 Pandemic (Malik, 2022). Public policy is a solution to problems that arise in people's lives and forms of concrete action from the Government's ability to manage the country (Sulistiadi & Rahayu, 2020). Public policy does not necessarily exist without the intervention of the bureaucracy; on the other hand, public policy cannot be implemented without bureaucratic activity. Public policy is any choice the Government makes, whether to do something or not (Zahrotunnimah, 2021). The public policy contains matters relating to the administration of the state and the relationship between the state and its people. The Government aims to create public policies, namely for the welfare of a just society. Thus, public policy must prioritize ethics that place the public interest as the main objective. Public policy is the key to crisis management during the Covid-19 era (Illiyyina et al., 2021).

a) Issuing Policies

Various government bureaucratic efforts have been carried out by issuing policies intended as a first step to prevent the spread of Covid-19 (Zahrotunnimah, 2021). An example of a policy issued by several provincial and local governments as an anticipatory step is to close access to and from their respective territories, be it air, land or sea routes (Sukarno & Saleh, 2021). The policies that have been issued are official and consistent statements that do not create confusion between the central and regional levels (Sulistiadi & Rahayu, 2020).

b) 19 Handling Policy Network

The policy for handling Covid-19 in Lhokseumawe City has established a pattern of relations between policy actors. The level of the institutional network in handling policies for Covid-19 is already good, as can be seen from the formation of a team for handling Covid-19 from the city and sub-district to village levels so that it makes it easier to monitor the development of Covid-19. Policies are effective from an institutional standpoint. Actors in the policy institution for handling Covid-19 in Lhokseumawe have yet to fully follow the established rules of behaviour in acting, so there are still inconsistencies in the field (Utari et al., 2021).

c) Policy Implementation

Policy-making during an epidemic is complicated because of economic and political interests, actors and targets. So that the implementation of vulnerable policies becomes ineffective (Sulistiadi & Rahayu, 2020). Relations within the institution will determine what policy implementation is realized, what problems must be resolved, and what decision-making (Utari et al., 2021). Even though there were innovations at the start of Covid-19, the handling of them was relatively less successful due to inhibiting factors such as the Government being too confident and underestimating the Covid-19 virus and the response of the public's indifference to government appeals in implementing policies but providing innovations in the field of health technology. Implementation of policies without clear priorities causes the rate of spread of Covid-19 to increase but on the other hand, there is a high level of concern to find solutions quickly. The success of policy implementation in detecting, preventing and responding to the

Covid-19 outbreak is determined by the health system's readiness (Aminullah & Erman, 2021).

Collaborative Governance; Regional Government, Local Government, Provincial Government

To overcome the problem of the Covid-19 Pandemic, the Government of Indonesia is collaborating with several parties, both the central Government, regional governments and other stakeholders (Wialdi et al., 2022). The increasing number of cases and deaths has forced the Government to take various steps to deal with the Covid-19 virus infection, starting from the central Government to the regions. Handling Covid-19 is a concurrent problem in which the Central Government and Regional Governments have authority and responsibility in dealing with the Covid-19 Pandemic. Thus, the Central and Regional governments work together to eradicate the Covid-19 Pandemic. Vaccination is one of the Central Government's measures to eliminate the Covid-19 Pandemic (Isril et al., 2021).

The Provincial Government is also responsible for distributing it to the regency and city areas (Isril et al., 2021). Several provincial and city governments have taken initiatives to control Covid-19. The provincial and city governments are the DKI Jakarta Government, the Solo City Government, the Central Java Provincial Government, and the West Java Provincial Government. The DKI Jakarta Provincial Government's initiative to control Covid-19 is to impose a ban on leaving Jakarta for three weeks. Likewise, the Central Java Provincial Government practices canalization techniques and is informative and educative of the same understanding to the City Government and its staff. The Central Java Provincial Government also closed all activities including teaching and learning activities, tourist attractions, and providing education to the public regarding the prevention of transmission of Covid-19 (Zahrotunnimah, 2021). The regional/provincial Government of DKI Jakarta is firm in implementing the policy of Imposing Restrictions on Community Activities (PPKM) which is the most effective key in breaking the rate of virus transmission in the Jakarta area (Malik, 2022).

a) Regional Government: policies have been issued but the level of citizen compliance is an obstacle.

The high number of Covid-19 cases in Indonesia is thought to be caused by ineffective government policies. It can be seen that the Government's attitude needs to be faster in dealing with the spread of Covid-19 in Indonesia (Nugroho & Audinovic, 2022). Therefore, public compliance with policies issued by the Government to tackle Covid-19 tends to be low (Balkis et al., 2021). Government policy is not a straightforward decision of a single political principle but is an unstable and incomplete expression of the changing collective choice of political tenets (Agustino et al., 2021).

The process of handling Covid-19 carried out by the Government of Indonesia has yet to have the same understanding and has resulted in communication at the government level not going well. There is a lot of information being disseminated through government social media. The amount of data will affect the social cognition of society. As a result, the community will feel confused about determining the appropriate information to follow and in the end, the district will decide to ignore information from the Government (Roziqin et al., 2021).

b) Local government issues

The Padang City Government and other government organizations are anticipating the spread of Covid-19 with several preventive measures. The initial step was to form a task force and volunteers to prevent the spread of the Covid-19 virus by the Decree of the Mayor of Padang Number 149 of 2020 concerning the Task Force for the Acceleration of Handling Corona Disease in 2019. The regional Government of Padang City has the authority to prepare an operational plan for handling response. Covid-19 emergency in Padang City. The working group unit in handling Covid-19 consists of many related agencies. Coordination is carried out between the scope of government organizations and private parties and implements good communication with stakeholders from the mass media group (Wialdi et al., 2022).

The Tangerang City Government's efforts in handling Covid-19 are by disseminating information on Covid-19 policies through online media, social media, and print media such as magazines, newspapers and other circulars. The Tangerang City Government's aim in disseminating programs and policies on

the Covid-19 Pandemic to the public is to carry out the process of bureaucratic information disclosure and accountability to the public so that public trust in the Government will also increase. Speed of information is needed in conveying the latest information both locally and nationally. This effort is carried out by the Government and is supported by the community and the accuracy of information targeting will produce genuine information and not become fake news. The people of Tangerang City are very enthusiastic and respond regarding the dissemination of information on the Covid-19 prevention policy carried out by the Tangerang City Government on social media. The community's enthusiasm can be seen from the community's participation in the Twitter account of the Tangerang City Government, which widely disseminates these tweets by the public (Satispi et al., 2021).

Changes in pandemic policy to endemic by the Central Government

Over the past year, the Government of Indonesia has made changes and flexible policies related to the Covid-19 Pandemic. Modifications to these policies have been implemented by the Government slowly. Some of the policies that have begun to be changed are allowing the return of homecoming in 2022, loosening the use of masks in open spaces, domestic travellers and foreign travellers do not need to show antigen or PCR test results if they have complete vaccines, face-to-face learning, and most recently the Government Indonesia has officially revoked the Implementation of Restricting Community Activities (PPKM).

a) Homecoming was permitted in 2022

On April 14, 2022, President Joko Widodo announced that the Government had allowed the public to return to their homecoming trips. Before deciding on this policy, President Joko Widodo had held a limited meeting on homecoming preparations. The results obtained were that the condition of the Covid-19 Pandemic in Indonesia was under control. Besides being allowed to return home, President Joko Widodo warned the public to remain vigilant so that there would be no spike in Covid-19 cases. The Government and its staff make strict regulations regarding the implementation of homecoming and are used

as guidelines for people who do homecoming (Sekretariat Kabinet RI, 2022a).

b) He is not allowed to wear a mask.

The Indonesian Government has slowly loosened regulations in an effort to prevent the Covid-19 Pandemic. One of them is allowing people not to use masks in open areas. This decision was delivered directly by President Joko Widodo on May 17 2022, at the Bogor Presidential Palace (Kemensetneg, 2022). The easing of these rules is the first step to begin the transition from Pandemic to endemic. Communities are starting to understand how to live a healthy life so that a transition towards endemic can be carried out. Changes to the rules that are implemented are not necessarily without reason. Changes to the rules were made taking into account the Covid-19 situation. According to (Kementerian Kesehatan RI, 2022), cases of Covid-19 in Indonesia have decreased and Indonesian people already have good resistance to the virus. However, there are exceptions that require a person to wear a mask, namely people with vulnerable populations and those who have symptoms such as fever, cough and runny nose.

c) Domestic travellers (PPDN) and foreign travellers (PPLN) with complete vaccines do not need to show antigen or PCR tests.

According to Circular Letter Number 21 of 2022 concerning Provisions for Domestic Travel During the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic, Domestic Travellers (PPDN) are people who travel from one region to another using land transportation, sea and air (Kementerian Luar Negeri RI, 2022). According to the Government, the condition and handling of Covid-19 in Indonesia continue to experience good results. These results can be seen from daily cases and deaths which continue to decrease. This is why the Government of Indonesia relaxed domestic or domestic travel regulations. In a video conference, the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Luhut Binsar Panjaitan, said that domestic travellers who have received complete vaccinations do not need to show antigen or PCR results. Every policy issued by the Government is based on the results of the observations of experts and experts (Sekretariat Kabinet RI, 2022b).

Foreign Travelers (PPLN) are foreigners or Indonesian citizens travelling abroad. The

Government has announced regulations regarding foreign travel. Foreign travellers who have received the second or booster vaccines are allowed to continue their journey, which means they no longer need to show antigen and PCR results (Direktorat Promkes RI, 2022).

d) Face-to-face learning

On May 11 2022, four Indonesian Ministries, including the Minister of Education and Culture, Minister of Religion, Minister of Health, and Minister of Home Affairs, issued a Joint Decree concerning guidelines for implementing learning during the Covid-19 Pandemic. The essence of the decree is that the Government is ready to carry out one hundred per cent face-to-face learning with the condition that the vaccination of educators and education staff reaches 80 per cent and above and the elderly are 60 per cent above. For those in the PPKM level 4 area, face-to-face learning can only be carried out 50 per cent, and distance learning can also be carried out (Kemdikbud RI, 2022).

e) Repeal of the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM)

On December 30 2022, President Joko Widodo, accompanied by Minister of Home Affairs Tito Karnavian and Minister of Health Budi Gunadi Sadikin, announced that the PPKM policy had been officially revoked. This decision was based on controlling the Covid-19 Pandemic, which is under good control. The number of cases of the Covid-19 Pandemic in Indonesia in recent months has been below WHO standards. Indonesia has managed to control the Covid-19 Pandemic well through implemented policies (Kemsetneg RI, 2022). The repeal of PPKM is a process for the Government of Indonesia to carry out a transitional period towards endemic. The Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia has issued Minister of Home Affairs Instruction Number 53 of 2022. The instruction contains the termination of PPKM and control of Covid-19 during the transition period towards endemic (Satgas Covid-19, 2022).

CONCLUSION

At the beginning of the Covid-19 Pandemic, Indonesia experienced a spike in Covid-19 cases, which were predominantly high. The Indonesian Government is trying to control the Covid-19 case by implementing various policies. The Government is tightening

all activities carried out by the community and increasing allocations to the health sector and social protection for the community. Central and local governments collaborate and cooperate in implementing policies. The Indonesian Government succeeded in implementing a vaccination program that created herd immunity in the formed community. The formation of group immunity makes people more immune to the Covid-19 virus. Over time, policies during the Covid-19 Pandemic experienced easing. Policy easing is based on the results of Covid-19 cases, which continue to decline, and the pandemic situation is increasingly under control. The easing of this policy includes allowing homecoming to return in 2022; people may not use masks in open spaces; Domestic Travelers (PPDN) and Foreign Travelers (PPLN) with complete vaccines do not need to show antigen or PCR tests; re-implementation of face-to-face learning, as well as the repeal of the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM). The policies relaxed by the Government are a step in the transition period from the Pandemic to the endemic. In implementing policies, the Government only sometimes runs smoothly. The Government needed to be considered faster in handling the Covid-19 Pandemic in the community.

REFERENCES

- Agustino, L., Sylviana, M., & Budiati, A. (2021). Government Capacity in Coping with Covid-19 in Bandung City. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 275-290. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i3.847>
- Aminullah, E., & Erman, E. (2021). Policy innovation and emergence of innovative health technology: The system dynamics modelling of early COVID-19 handling in Indonesia. *Technology in Society*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101682>
- Annisa, D. (2021, September). *Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 16 September 2021*. Infeksi Emerging. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-16-september-2021>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Arifin, B., & Anas, T. (2021). Lessons learned from COVID-19 vaccination in Indonesia: experiences, challenges, and opportunities. *Human Vaccines and Immunotherapeutics*, 17(11), 3898–3906. <https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1975450>
- Balkis, A. H., Hutagalung, B. K. S., & Oktaviani, N. H. (2021). Urgensi Public Trust dalam Mempengaruhi Pola Perilaku Kepatuhan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia The Exigency of Public Trust In Affecting Public Compliance During The Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Spirit Publik*, 16(2), 129–136.
- Banowati, R. C., & Dewi, D. S. K. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH POST PANDEMIC TENTANG PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI (PPLN). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i8.2022.2788-2794>
- Citra Eka Putri, & Hamzah, R. E. (2022). PEDULILINDUNG APPLICATION AS A COMPREHENSIVE COMMUNICATION MANAGEMENT IN INDONESIA. *Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences*, 2(2), 108–119. <https://doi.org/10.32509/mirshus.v2i2.37>
- Clarke, S. O., Coates, W. C., & Jordan, J. (2021). A practical guide for conducting qualitative research in medical education: Part 3—Using software for qualitative analysis. *AEM Education and Training*, 5(4). <https://doi.org/10.1002/aet2.10644>
- Direktorat Promkes RI. (2022). *Syarat Masuk Indonesia Bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri*. Promkes.Kemkes.Go.Id. <https://promkes.kemkes.go.id/syarat-masuk-indonesia-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- EMedia DPR RI. (2022). *Transisi Status Menjadi Endemi*. EMedia DPR RI. <https://emedia.dpr.go.id/article/transisi-status-menjadi-endemi/>
- Firdaus, S. U. (2022). The urgency of legal regulations existence in case of COVID-19 vaccination refusal in Indonesia. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 91. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2022.102401>
- Hong, H., Noh, J. Y., Lee, H., Choi, S., Choi, B., Kim, J. K., & Shin, E. C. (2022). Modeling Incorporating the Severity-Reducing Long-term Immunity: Higher Viral Transmission Paradoxically Reduces Severe COVID-19 During Endemic Transition. *Immune Network*, 22(3). <https://doi.org/10.4110/in.2022.22.e23>
- Humas Kemensetneg. (2022, December). *Pemerintah Resmi Cabut Kebijakan PPKM Mulai Hari Ini*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_resmi_cabut_kebijakan_ppkm_mulai_hari_ini
- Illiyyina, I., Rahmi, F. A., Lesmana, R. H., & Kriswibowo, A. (2021). Analysis of Public Trust toward Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) Certification Policy in Surabaya City. *Journal of Local Government Issues*, 4(2), 121–135. <https://doi.org/10.22219/logos.v4i2.16742>
- Infeksi Emerging. (2021). *SITUASI INDONESIA 2 Peta Situasi di Indonesia CFR dan Recovery Rate (%)*. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>
- Isril, I., Harirah MS, Z., & Rizaldi, A. (2021). Evaluation of the Covid 19 Vaccine Policy for the Elderly Community in Pekanbaru City. *Jurnal Transformatif*, 7(2), 226–240. <https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2021.007.02.4>
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- Kemdikbud RI. (2022). *SKB 4 Menteri Terbaru Atur Pembelajaran Tatap Muka Seratus Persen*. Kemdikbud.Go.Id.
- Kemensetneg. (2022). *Pemerintah Longgarkan Kebijakan Pemakaian Masker bagi Masyarakat*. Setneg.Go.Id. https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_longgarkan_kebijakan_pemakaian_masker_bagi_masyarakat
- Kemensetneg RI. (2022). *Pemerintah Resmi Cabut Kebijakan PPKM Mulai Hari Ini*. Setneg.Go.Id. https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_resmi_cabut_kebijakan_ppkm_mulai_hari_ini
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Transisi Pandemi ke Endemi: Diperbolehkan Tidak Memakai Masker di Ruang Terbuka*. Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/ril>

- is-media/20220517/0739878/transisi-pandemi-ke-endemi-diperbolehkan-tidak-memakai-masker-di-ruang-terbuka/
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *SURAT EDARAN NOMOR 21 T AHUN 2022 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*. Kemlu.Go.Id.
- Kemkes. (2022, March 3). *Kolaborasi dan Penguatan Layanan Kesehatan Menjadi Hal Penting dalam 2 Tahun Penanganan Pandemi COVID-19*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220303/1939453/kolaborasi-dan-penguatan-layanan-kesehatan-menjadi-hal-penting-dalam-2-tahun-penanganan-pandemi-covid-19/>
- Kesehatan, J. S., Hafidz, F., Kusila, G. R., Nadhira, F., Daniel, D., Baros, W. A., Revelino, D., Dhanalvin, E., Saut, B., Jaya, C., & Oktavia, A. (2022). Utilization and expenditure of Indonesia National Health Insurance before and during COVID-19 pandemic in Indonesia: a descriptive study. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 38(7), 237–244. <https://doi.org/10.22146/bkm.v38i7.4964>
- Kim, S., Goh, Y., & Kang, J. H. B. (2022). Moving toward a common goal via cross-sector collaboration: lessons learned from SARS to COVID-19 in Singapore. *Globalization and Health*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12992-022-00873-x>
- Malik, N. (2022). Covid 19 Governance in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Journal of Local Government Issues*, 5(2), 145–160. <https://doi.org/10.22219/logos.v5i2.22321>
- Martina. (2022). *Proceeding the 4 th International Conference on Social Sciences and Humanities Controlling the COVID-19 Delta Virus Outbreak in Indonesia by Implementing Emergency Public Activity Restriction Regulations and Accelerating Vaccines*. <https://databoks.katadata.co.id>,
- Nugroho, R. S., & Audinovic, V. (2022). The discourse of COVID-19 vaccine in the Indonesian Ministry of Health Instagram @kemenkes_ri. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 35(4), 496–513. <https://doi.org/10.20473/mkp.v35i4.2022.496-513>
- Putera, P. B., Widianingsih, I., Ningrum, S., Suryanto, S., & Rianto, Y. (2022). Overcoming the COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Science, technology, and innovation (STI) policy perspective. *Health Policy and Technology*, 11(3). <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2022.100650>
- Roziqin, A., Mas'udi, S. Y. F., & Sihidi, I. T. (2021). An analysis of Indonesian government policies against COVID-19. *Public Administration and Policy*, 24(1), 92–107. <https://doi.org/10.1108/PAP-08-2020-0039>
- Sabiila, S. I. (2022, April). *Kasus Corona Pertama di Indonesia, Ini Kilas Balik Usai 2 Tahun Berlalu*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5964691/kasus-corona-pertama-di-indonesia-ini-kilas-balik-usai-2-tahun-berlalu/3>
- Satgas Covid-19. (2022). *Inmendagri No. 53 Tahun 2022*. Covid19.Go.Id. <https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2022/Desember/INMENDAGRI%20NOMOR%2053%20TAHUN%202022%20TENTANG%20PENGECAHAN%20DAN%20PENGENDALIAN%20COVID-19%20PADA%20MASA%20TRANSISI%20MENUJU%20ENDEMI.pdf>
- Satispi, E., DyasTuti, R. W., Fathani, A. T., & Kaewhanam, P. (2021). Local Government Respond to COVID-19 Pandemics: A Study of South Tangerang City. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(2), 82–92. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.11439>
- Sekretariat Kabinet RI. (2022a). *Pernyataan Presiden RI tentang Mudik dan Pemberian THR & Gaji ke-13 Tahun 2022, 14 April 2022*. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/pernyataan-presiden-ri-tentang-mudik-dan-pemberian-thr-gaji-ke-13-tahun-2022-14-april-2022/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2022b). *Situasi Pandemi Membaik, Pemerintah Kembali Lakukan Sejumlah Penyesuaian Kebijakan*. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/situasi-pandemi-membaik-pemerintah-kembali-lakukan-sejumlah-penyesuaian-kebijakan/>
- Sembiring, L. J. (2022, May). *RI Menuju Endemi, Ini Daftar Kebijakan yang Sudah Berubah!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220520161342-4-340542/ri-menuju-endemi-ini-daftar-kebijakan-yang-sudah-berubah>
- Sukarno, B., & Saleh, F. (2021). Vertical Conflict, Public Policies, and Pandemic Covid-19: Case Study of Central and Regional Government of DKI Jakarta. In *Jurnal Studi Sosial dan Politik* (Vol. 5, Issue 1).
- Sulistiadi, W., & Rahayu, S. (2020). The Effectiveness of COVID-19 Countermeasure Policy Implementation in Seven ASEAN Countries. *JOURNAL OF INDONESIAN HEALTH POLICY AND ADMINISTRATION*, 5(2), 43–49. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

- Utari, R., Aiyub, A., Nurhafni, N., Muryali, M., & Maryam, M. (2021). Policy Networks in Handling Covid-19 in Lhokseumawe-Indonesia. *Malikussaleh Social and Political Reviews*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.29103/mspr.v2i1.4914>
- Wardhana, D. (2020). Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-Covid-19. In *The Indonesian Journal of Development Planning: Vol. IV* (Issue 2).
- Wialdi, P. F., Putera, R. E., Ariany, R., & Hasymi, E. (2022). The Collaboration of Padang City Government in Managing Covid-19 Disaster through The Dynamic Governance Concept. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 173. <https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.65146>
- Zahrotunnimah, Z. (2021). Beginning of the Pandemic Period. *RUDN Journal of Public Administration*, 8(2), 153-166. <https://doi.org/10.22363/23122831332021188221533166>





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124 Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B (SK Nomor 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
PRODI ILMU PEMERINTAHAN

NAMA : Putra Anugerah Wibowo
NIM : 19221819
PEMBIMBING I : Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.A.P
PEMBIMBING II : Dr. Ekspati Wahjuni D.J., M.Si
JUDUL : Moving Towards The Common Goal of Collaborative Emergence in Indonesia Amid The Endemic covid-19

NO.	TANGGAL	BAB	REVISI	PARAF PEMBIMBING
1	20/12		Bimbingan topik penelitian	<i>[Signature]</i>
2	27/12		Tabel taxonomi	<i>[Signature]</i>
3	28/12		Bimbingan aplikasi Nvivo	<i>[Signature]</i>
4	2/2023		Pendahuluan	<i>[Signature]</i>
5	5/2023		Metode Penelitian	<i>[Signature]</i>
6	10/1		Revisi Pendahuluan	<i>[Signature]</i>
7	13/1		Revisi Metode Penelitian	<i>[Signature]</i>
8	19/1		Bimbingan Coding Nvivo	<i>[Signature]</i>
9	20/1		Pembahasan	<i>[Signature]</i>
10	24/1		Bimbingan format template	<i>[Signature]</i>
11	26/1		Bimbingan submit artikel	<i>[Signature]</i>
12	27/1		ACC template dan submit	<i>[Signature]</i>
13				
14				

Pembimbing I

Mengetahui,
Ketua Program

Pembimbing II

[Signature]
Dr. Dian Suluh K. M.A.P
NIDN. 0703058104

[Signature]
Dr. Robby Darius N., M.A
NIDN. 0728028603

[Signature]
Dr. Ekspati Wahjuni D.J., M.Si
NIDN. 0722126101

SURAT KEPUTUSAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Berdasarkan hasil penilaian dari tim editor dan mitra bestari, artikel dengan perincian sebagai berikut :

Judul : Moving Towards The Common Goal Of Collaborative Governance In Indonesia Amid The Endemic Covid-19

Tim Penulis : Putra Anugerah Wibowo, Dian Suluh Kusuma Dewi

Prodi/Fakultas : Ilmu Pemerintahan/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dapat dipublikasikan di :

Jurnal IJGCS (Jurnal Mahasiswa FISIP)

Link Jurnal :

Edisi Terbitan :

Jurnal Ilmiah Eksternal/Luar Kampus UNMUH Ponorogo

Nama Jurnal : PERSPEKTIF

Link Jurnal : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/9422>

Edisi Terbitan : Volume 12, Nomor 3, Juli 2023

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

(eprints.umpo.ac.id)

Demikian informasi yang dapat disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

Ponorogo, 07 Agustus 2023

Editor in Chief IJGCS



Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP
NIK. 19810527 201112 12

June 23th 2023

LETTER OF ACCEPTANCE
Papper Number #9422

Dear, Putra Anugerah Wibowo* & Dian Suluh Kusuma Dewi

This is to inform you that the manuscript entitled: “**Moving Towards The Common Goal of Collaborative Governance in Indonesia Amid The Endemic Covid-19**”, which was sent on **April 17th 2023**, has been **ACCEPTED**.

We are keep to ensuring a high standard of articles published in **PERSPEKTIF**, and the manuscript that is being sent to you has been submitted after a first selection process based on the agreement of the Associate Editors. In general, the standard of manuscripts forwarded to me after the vetting is **good**.

This paper is well organized and followed the manuscript guidelines of the journal to a large extent. The introduction section is good and shows the importance of the study. The literature review is adequate. The outcomes of the study are consistent with the findings. The approach used is praiseworthy. In my opinion, it should be published with **no revision again**

Based on the review results, this manuscript has been **ACCEPTED**, and will be published in **PERSPEKTIF: Volume 12, No. 3, July 2023**.

We thank you very much for your contribution. Congratulations on a wonderful job.

Warmest Regards,
Editor In Chief

PERSPEKTIF
ISSN 2085-0328 (print) | 2684-9305 (online)

Agung Sularyanto S.Sn, M.Si.

Editorial Office:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
Jl. Kolam, No. 1. Medan Estate, Sumatera Utara, Indonesia.
Cp: +628126493527, Email: perspektif@uma.ac.id

Has been indexing on:





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN
Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, 487662 Fax (0352) 461796,
Website: library.umpo.ac.id
TERAKREDITASI A
(SK Nomor 00137/LAP.PT/III.2020)

SURAT KETERANGAN
HASIL SIMILARITY CHECK KARYA ILMIAH MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Dengan ini kami nyatakan bahwa karya ilmiah dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Putra Anugerah Wibowo

NIM : 19221819

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Judul : Moving Towards The Common Goal of Collaborative Governance in Indonesia Amid The Endemic Covid-19

Dosen pembimbing :

1. Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP

2. Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si

Telah dilakukan check plagiasi berupa Artikel di L2P Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan prosentase kesamaan sebesar 7 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 7 Agustus 2023

Petugas pemeriksa



(Mohamad Ulil Albab, SIP)
NIK.1989092720150322

Nb: Dosen pembimbing dimohon untuk mengecek kembali keaslian soft file karya ilmiah yang telah diperiksa melalui Turnitin perpustakaan